

BAB 3

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI

Di tengah dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, maka prasyarat bagi suatu daerah untuk tetap bertahan adalah perlunya visi yang jelas. Dengan visi pembangunan daerah yang jelas, akan menjadi petunjuk bagi segenap jajaran (*stakeholders*) di daerah untuk menyongsong masa depan. Visi akan menentukan arah "akan dibawa kemana" Propinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Visi pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah adalah:

"Terwujudnya kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, sejahtera, mandiri dan bermartabat dalam lingkungan yang lestari diikuti suasana kehidupan yang semakin demokratis, damai dan berkeadilan serta pemerintahan yang bersih, profesional dan berwibawa sejalan dengan falsafah hidup "Huma Betang" dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

3.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, maka dirumuskan beberapa misi pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah, yang uraiannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, berdaya tahan, berwawasan luas, terampil, produktif, bermental baik, berbudi pekerti luhur, berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memberdayakan dan memperkuat seluruh kekuatan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan terutama dikalangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan

mendayagunakan secara efisien dan efektif potensi sumber daya yang dimiliki daerah Propinsi Kalimantan Tengah, untuk kemanfaatan pengembangan perekonomian daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, kemajuan dunia usaha dan kecukupan sandang, pangan dan papan.

3. Meningkatkan dan memantapkan kehidupan sosial budaya, guna membentuk jati diri masyarakat Kalimantan Tengah yang utuh dan tangguh berlandaskan pada kepribadian, etika moral, sikap kritis dan dinamis sehingga memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif dari arus globalisasi yang menyentuh keseluruhan dimensi kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka memajukan kesejahteraan, memperluas pelayanan sosial kemasyarakatan, mempercepat pembangunan ekonomi daerah mempertinggi pertumbuhan ekonomi, mendorong kegiatan investasi, memperlancar perdagangan antar daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mempertinggi mobilitas dan interaksi sosial ekonomi antar daerah, mempercepat pengembangan wilayah, baik pemekaran wilayah pemerintahan, pengembangan pusat pertumbuhan, pemantapan sentra produksi maupun sentra industri.
5. Meningkatkan pendayagunaan ataupun sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari untuk digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah, baik untuk kepentingan kelangsungan hidup generasi kini maupun generasi mendatang.

3.3. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Kesimpulan tentang fakta dan kondisi kekinian yang menjadi permasalahan serta isu strategis utama pelaksanaan pembangunan daerah Kalimantan Tengah telah menggiring kesepakatan berbagai pihak di daerah untuk menetapkan arah kebijaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka mewujudkan visi bersama. Beberapa pernyataan arah dan kebijaksanaan pemban-

gunan daerah yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan strategis daerah dalam periode tiga tahun kedepan, adalah;

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di berbagai bidang pembangunan,
2. Meningkatkan Kualitas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Daerah,
3. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan daerah,
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama kaum miskin dan terkebelakang,
6. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal serta berkelanjutan,

3.3.1 Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

Kebijakan desentralisasi yang mulai diberlakukan semenjak 1 Januari tahun 2001 lalu telah mengubah kedudukan dan fungsi daerah propinsi menjadi otoritas tersendiri dengan peran baru sebagai pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Semenjak itu, seluruh jajaran Pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah melakukan pembenahan-pembenahan yang bersifat membijaki perubahan peran tersebut, disamping tetap pada jalur peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan pembenahan-pembenahan yang telah dilakukan, Bidang Administrasi Umum Pemerintahan merupakan jantung koordinasi peran baru Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah akan memfokuskan kebijakannya pada beberapa pernyataan berikut ini;

- Mengelola keuangan daerah yang diulasarkan pada prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas,
- Menggali potensi sumberdaya pendapatan daerah yang tidak mempunyai efek negatif terhadap kesejahteraan masyarakat,

- Mendorong peningkatan kinerja legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran,
- Mendorong pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah yang didasari oleh prinsip ramping struktur namun kaya fungsi,
- Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah,
- Memperkuat terlaksananya prinsip akuntabilitas dalam seluruh siklus kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- Mengkoordinasikan pengembangan potensi ekonomi daerah,
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur di berbagai tataran struktur dan teknis fungsional,
- Mendorong peningkatan partisipasi wanita dalam pelaksanaan pembangunan daerah,
- Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan daerah Kabupaten/Kota baru di Propinsi Kalimantan Tengah,
- Memperkuat penyebaran informasi kebijakan daerah kepada masyarakat,
- Memperkuat basis hukum pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah dalam berbagai bidang pembangunan
- Memperkuat fasilitasi partisipasi politik serta perlindungan kepada masyarakat.

3.3.2 Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Fakta tentang cukup besarnya peran sektor pertanian, peternakan dan dan perkebunan dalam struktur perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah dan cukup besarnya jumlah penduduk yang bergerak di sektor ini telah mengharuskan adanya kebijaksanaan yang tepat serta mampu memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya sektor ini.

Sedangkan pada bidang perkebunan isu utama yang mengemuka adalah belum optimalnya pengembangan perkebunan tanaman pada lahan perkebunan masyarakat. Sesuai dengan batasan kewenangan yang diemban oleh Pemerintah Propinsi dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan ini, maka arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Tengah, selama tiga tahun kedepan, adalah:

- Memfasilitasi peningkatan status pertanian sub-sistem ke arah pertanian agrobisnis yang lebih memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, I
- Mengembangkan potensi sumber daya peternakan yang berbasis pada sumber daya lokal,
- Mempromosikan pengembangan komoditas pangan pada lahan-lahan perkebunan masyarakat.

3.3.3 Bidang Perikanan dan Kelautan

Keberadaan sumber daya perikanan darat dan laut di Propinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini belum mampu dimanfaatkan secara optimal sebagai sumberdaya yang mendorong peningkatan status kesejahteraan masyarakat. Hal ini diindikasikan oleh rendahnya peran sektor ini terhadap produksi agregat daerah.

Upaya-upaya pemanfaatan dan pengembangan selama ini masih terhalang oleh keberadaan sarana pendukung yang belum memadai disamping lemahnya basis penguasaan pengetahuan dan teknologi sumberdaya manusia di bidang ini.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah di bidang perikanan dan kelautan selama periode tiga tahun ke depan, adalah;

- Mengembangkan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dengan tetap mempertimbangkan Upaya Pelestarian.

3.3.4 Bidang Pertambangan dan Energi

Eksplorasi sumber daya pertambangan dan energi di Kalimantan Tengah sejauh ini hanya mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2.5% pertahun dari seluruh produksi agregat Propinsi Kalimantan Tengah. Upaya-upaya penemuan terhadap sumberdaya pertambangan baru selanjutnya harus dilakukan untuk meningkatkan peran sektor ini.

Disamping itu, eksplorasi pertambangan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan masyarakat harus mampu memenuhi prosedur pertambangan yang ramah terhadap lingkungan sehingga eksplorasi lingkungan Wdup dapat diminimalisir. Secara lebih spesifik, arah dan kebijaksanaan umum pembangunan daerah di bidang pertambangan dan energi selama tiga tahun kedepan, adalah;

- Memfasilitasi Penemuan Sumber Daya Pertambangan Baru, Serta Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Liar.

3.3.5 Bidang Kehutanan

Eksplorasi sumber daya kehutanan yang berlebihan pada masa lalu diduga telah menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah pada akhir-akhir ini. Luasnya area] terlantar yang diakibatkan oleh kegagalan proyek lahan gambut sejuta hektar, bencana kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahun, terjadinya pencurian hasil hutan secara illegal (*Illegal Logging*) merupakan beberapa isu utama yang harus ditindaklanjuti dengan respon kebijakan yang tepat serta efektif. Selanjutnya secara lebih spesifik, arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah di bidang kehutanan ini, adalah;

- Mendorong upaya perlindungan, Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan bagi Pengembangan Sistem Usaha Kehutanan yang Berbasis Pada Masyarakat Lokal

3.3.6 Bidang Industri dan Perdagangan

Bagi banyak Daerah perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan merupakan motor bagi upaya percepatan peningkatan pendapatan masyarakatnya. Bidang perindustrian dan perdagangan yang dinamis sangat penting karena di bidang inilah proses penciptaan nilai tambah. Untuk Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kemampuan SDM pengusaha serta rendahnya penggunaan teknologi pada usaha yang bergerak di bidang perindustrian dan Perdagangan. Disamping rendahnya koordinasi kebijakan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Selaras dengan permasalahan dan lingkup kewenangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, arah kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan adalah;

- Meningkatkan Kualitas Kebijakan Industri dan Perdagangan,
- Industri dan Perdagangan dalam Upaya Mendukung Perlindungan Konsumen

3.3.7 Bidang Koperasi dan UKM

Beberapa permasalahan umum yang masih ditemui dalam pengembangan Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut belum tersedianya aturan hukum dan kebijakan yang konklusif bagi Perkembangan KUKM, terbatasnya akses dunia perkoperasian dan UKM pada Sumber-sumber Daya Produktif; belum berkembangnya manajemen/kewirausahaan KUKM, belum berkembangnya budaya usaha bagi kelompok masyarakat miskin.

Berkaitan dengan beberapa permasalahan dan isu strategis tersebut, arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah di bidang koperasi dan UKM ini adalah;

- Penciptaan lingkungan yang kondusif bagi Perkembangan koperasi dan usaha kecil.

3.3.8 Bidang Penanaman Modal

Peningkatan arus investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri bisa terjadi hanya jika terpenuhi adanya penciptaan iklim usaha yang kondusif kompetitif dan non diskriminatif yang selama ini masih kurang memadai. Selain hal tersebut juga masih rendahnya hubungan dan koordinasi antar BPMD, belum terpenuhinya kualitas SDM yang handal, serta clukungan sarana dan prasarana yang seringkali masih terkesan seadanya. Penerbitan izin yang lebih akomodatif, pengawasan dan pengendalian penanaman modal juga masih kurang atau perlu ditingkatkan kualitasnya.

Berdasarkan hal tersebut, arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah di bidang penanaman modal ini adalah;

- Mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif bagi Perkembangan penanaman modal dalam negeri dan asing di Propinsi Kalimantan Tengah
- Fasilitasi Peningkatan Promosi Yang Mendorong Peningkatan Minat Berinvestasi di Propinsi Kalimantan Tengah.

3.3.9 Bidang Ketenagakerjaan

Beberapa masalah dan isu utama yang menjadi kendala pengembangan status kesejahteraan tenaga kerja di Propinsi Kalimantan Tengah meliputi; masih lemahnya aspek perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan kerja guna menampung tenaga kerja yang ada, Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja, Masih rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja dibandingkan dengan kebutuhan dunia kerja Berdasarkan permasalahan utama di atas, arah kebijakan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan meliputi :

- Mendorong serta memfasilitasi terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha;
- Fasilitasi Perluasan Dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan

3.3.10 Bidang Kesehatan

Keberadaan pelayanan kesehatan yang memadai serta murah merupakan tantangan kebutuhan yang harus direspon dengan kebijakan yang tepat. Sedemikian jauh, tingkat pelayanan kesehatan di Propinsi Kalimantan Tengah belum dapat dikatakan prima, Beberapa permasalahan utama yang segera akan direspon oleh jajaran

pelaksana kewenangan di Propinsi Kalimantan Tengah adalah; masih terdapat golongan masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, belum terbudayanya perilaku sehat dalam kehidupan masyarakat, kesehatan lingkungan yang belum terjaga, kurangnya respon masyarakat dalam mensukseskan gerakan anti tembakau, alkohol dan madat, adanya ancaman penyakit menular, belum optimalnya pelaksanaan pengawasan obat makanan dan bahan berbahaya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, arah dan kebijaksanaan umum pembangunan daerah di bidang kesehatan ini, adalah :

- Fasilitasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui budaya dan perilaku hidup sehat
- Fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengembangan lingkungan sehat
- Fasilitasi pengembangan sumberdaya kesehatan

3.3.11 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan semenjak 1 Januari 2001 lalu telah membuat cukup sibuk lembaga yang berwenang di bidang pendidikan, hal ini didorong oleh cukup kompleks penataan kewenangan

hirarki birokrasi, baik pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Disamping pelayanan pendidikan yang selama ini dilaksanakan baik pada level dasar, menengah dan tinggi belum dapat dikatakan cukup memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah;

- Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi di propinsi Kalimantan Tengah
- Fasilitasi pengembangan nilai-nilai budaya lokal Kalimantan Tengah

3.3.12 Bidang Sosial

Masalah sosial yang berkembang akibat krisis moneter pada tahun 1997 hingga saat ini adalah semakin banyaknya masyarakat miskin yang melanda seluruh negeri karena itu perlu adanya pemberdayaan terhadap masyarakat miskin Juga terhadap lembaga yang menanganinya perlu juga penanganan agar lembaga-lembaga tersebut menjadi berdaya. Kemerosotan perekonomian negeri ini mengharuskan keberadaan organisasi masyarakat yang kondusif dan fungsional yang juga dapat membuat masyarakat semakin sadar akan berorganisasi terutama masyarakat miskin semakin maju ketika mereka mau turut berperan aktif dalam harapannya akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari masyarakat miskin.

Berkaitan dengan hal tersebut, arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial ini adalah:

- Fasilitasi bantuan sosial pada masyarakat,
- Memperkuat partisipasi dan swadaya masyarakat Dalam ikut serta menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan

3.3.13 Bidang Pekerjaan Umum

Bidang pekerjaan umum merupakan bidang

pendukung utama bagi perkembangan aktivitas masyarakat di bidang-bidang lainnya. Meningkatkan kinerja bidang ini akan dapat memicu perkembangan di bidang-bidang lain, khususnya di bidang yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi di bidang ini adalah masih banyaknya daerah yang terpencil yang hanya dapat dicapai dengan waktu tempuh yang relatif lama, baik karena belum adanya prasarana jalan dan jembatan maupun akibat kerusakan prasarana-prasarana tersebut.

Selaras dengan permasalahan di atas, arah kebijakan di bidang pekerjaan umum ini adalah;

- Memfasilitasi Pengembangan Infrastruktur yang mendorong Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah

3.3.14 Bidang Perhubungan

Secara umum permasalahan-permasalahan yang dominan menghambat pelaksanaan pembangunan dalam bidang ini adalah Kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi yang masih perlu ditingkatkan, perlunya peningkatan kesadaran disiplin para pengguna layanan transportasi dan pengelola jasa perhubungan, kurangnya penyediaan jasa layanan informasi yang memadai yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (publik) atau mitra kerja, perlunya peningkatan fasilitas layanan lalu lintas pada semua jenis angkutan dan peningkatan kualitas pengawasan pada jasa layanan perhubungan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang mengemuka tersebut, maka arah dan kebijaksanaan daerah di bidang perhubungan ini adalah;

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan,
- Memfasilitasi peningkatan aksesibilitas wilayah,

3.3.15 Bidang Lingkungan Hidup

Masih rawannya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan prioritas dalam pengelolaan pelestarian kawasan lingkungan hidup, pengelolaan dan sumber informasi yang minim didapat baik oleh masyarakat maupun pengguna hutan dan lahan merupakan hambatan dalam pelestarian lingkungan hidup. Serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kerusakan dan pencemaran lingkungan merupakan aspek yang sangat di perhitungkan dalam pelestariannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, arah dan kebijaksanaan daerah dalam bidang lingkungan hidup ini adalah;

- Menyediakan basis informasi yang memperkuat upaya perlindungan dan konservasi lingkungan hidup,
- Memfasilitasi penguatan upaya konservasi dan pelestarian lingkungan hidup

3.3.16 Bidang Kependudukan

Salah satu implikasi penting dari Perkembangan Penduduk yang tidak terkendali adalah tingginya tingkat kerawanan sosial dan kemiskinan. Hal ini perlu direspon dengan kebijakan yang tepat sehingga perkembangan penduduk justru menjadi penyumbang yang signifikan terhadap perkembangan daerah. Beberapa permasalahan utama yang selanjutnya menjadi fokus penanganan daerah Propinsi Kalimantan Tengah, adalah ; belum tersedianya basis informasi dan data yang relevan bagi penataan kependudukan antar wilayah masih lemahnya kualitas sumberdaya manusia bidang kependudukan, masih terjadinya kerawanan sosial dan kemiskinan yang disebabkan oleh tidak tertatanya perwilayahan kependudukan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, arah dan kebijaksanaan daerah di bidang kependudukan ini adalah;

- Memfasilitasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar

3.3.17 Bidang Pemuda dan Olah Raga

Bidang Olahraga yang dimotori oleh Badan Pemuda dan Olah Raga Daerah Propinsi Kalimantan Tengah merupakan badan yang terutama akan menjadi motor untuk peningkatan martabat dan identitas masyarakat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini perlu ditekankan karena salah satu komponen visi Daerah Propinsi Kalimantan Tengah menyangkut martabat masyarakat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan utama yang dihadapi di bidang olahraga ini adalah belum optimalnya kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dari seluruh pihak terkait, khususnya Bapora Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan Bapora kabupaten dan kota yang ada di Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, permasalahan lain yang juga sangat menentukan kinerja kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan adalah masih rendahnya pemasyarakatan olahraga dan kompetisi keolahragaan.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan pemuda/i, yang pada akhirnya menurunkan angka partisipasi pemuda/i dalam proses pembangunan di Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Selaras dengan permasalahan di atas, arah kebijakan di bidang Olahraga ini adalah:

- Memfasilitasi peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

3.3.18 Bidang Pariwisata

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Dalam pengembangan bidang Kepariwisata selama ini, meliputi: belum, optimalnya pemanfaatan dan pengembangan sarana

dan objek wisata yang ada di Kalimantan Tengah, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang Kepariwisata, tingginya pengaruh negatif dunia kepariwisataan terhadap budaya daerah.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah di bidang pariwisata ini adalah:

- Mendorong terciptanya kemitraan antar daerah tujuan wisata dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mendukung peningkatan *performance* objek dan daya tarik wisata yang berbasis pada *travel interest* dan *tourist interest*;

BAB 4

PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

1.1. FAKTOR PENENTU PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS

Pada tahap penentuan program dan kegiatan strategis, partisipasi penuh dari unit kerja perangkat organisasi Propinsi Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan. Pada pelaksanaannya, aplikasi pendekatan partisipasi penuh ini telah menyebabkan banyaknya usulan program dan kegiatan yang diajukan. Agar seluruh usulan program dan kegiatan terarah pada upaya pencapaian visi daerah Propinsi Kalimantan Tengah, maka usulan program dan kegiatan akan dipilih Berdasarkan ukuran-ukuran yang lebih operasional.

Ukuran-ukuran operasional yang digunakan untuk seleksi program dan kegiatan strategis daerah Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: usulan program dan kegiatan dari tiap unit kerja akan diakomodir dalam Rencana Strategik Daerah Propinsi Kalimantan Tengah bila:

1. Usulan program dan kegiatan masih Dalam lingkup kewenangan daerah Propinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan PP No. 25 Th. 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan pemerintah propinsi sebagai daerah otonom.
2. Usulan program dan kegiatan harus mampu mewujudkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Tengah, seperti yang telah dibahas dalam Bab 3.
 - Apakah program dan kegiatan yang diusulkan mempunyai efek (hasil) terhadap peningkatan SDM yang diperlukan oleh daerah propinsi kalteng.
 - Apakah program dan kegiatan yang diusulkan mempunyai efek (hasil) terhadap peningkatan kualitas pertanggung jawaban aparatur.
 - Apakah program dan kegiatan yang diusulkan mempunyai efek (Hasil) terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah.

- Apakah program dan kegiatan yang diusulkan mempunyai efek (Hasil) terhadap peningkatan sarana dan prasarana intrastruktur yang diperlukan daerah.
 - Apakah program dan kegiatan yang diusulkan mempunyai efek (Hasil) terhadap peningkatan tarap hidup masyarakat terutama kaum miskin dan terbelakang.
 - Apakah program dan kegiatan yang diusulkan mempunyai efek (Hasil) terhadap peningkatan pengelolaan Sumberdaya Alam secara berkelanjutan.
3. Keterkaitan program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh unit kerja pengusul.
 4. Keterkaitan Program dan kegiatan dengan arah yang telah ditunjukkan dalam pedapa kalteng 2001 - 2005.

4.2. BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN

Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, maka program dan kegiatan strategis pada Bidang Pemerintahan Umum antara lain:

1. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan aturan main baru yang diterapkan dalam era otonomi daerah, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah:
 - Penyusunan Anggaran Belanja Berbasis Kinerja; Penatausahaan APBD;
 - Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Akuntansi;
 - Penyusunan LPJ Kepala Daerah.
2. Program Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran program ini ditujukan untuk penyediaan pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efisien dan efektif serta meningkatkan kinerja aparatur dalam penatausahaan di Unit kerja Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, kegiatan kegiatannya adalah:

 - Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Sesuai Dengan PP No.

- 105 Tahun 2000 Bagi Pejabat Daerah;
 - Penyusunan Perda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pelatihan Penyusunan Anggaran Kinerja bagi staf Unit Organisasi
 - Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bagi staf Unit Organisasi
 - Penyempurnaan Sistem Komputerisasi Keuangan Daerah.
3. Program Peningkatan sarana dan prasarana fisik aparatur Pemerintah Daerah.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas Unit Kerja dalam melayani masyarakat, kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintah dan Aset Daerah
 - Penyediaan Sarana/Fasilitas/Mobilitas Pemerintah Daerah
4. Program Penataan dan Pengembangan sistem pengelolaan barang Pemerintah Daerah.
- Sasaran program ini ditujukan agar tertibnya pelaksanaan pengelolaan barang
 - Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, kegiatan-kegiatannya antara lain:
 - Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Daerah;
5. Program Peningkatan pelayanan kehidupan beragama di Propinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan motivasi dalam melaksanakan ibadah, kegiatan-kegiatannya adalah:

- Fasilitasi Bantuan Untuk Lembaga Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu Keharingan, Budha, dan Hindu.
 - Fasilitasi untuk Badan Narkoba Kalimantan Tengah
6. Program Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan terhadap Kabupaten Baru.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah kepada masyarakat pada 8 (delapan) Kabupaten Baru, yang kegiatan-kegiatannya adalah:

- Pembinaan, Terhadap 8 (delapan) Kabupaten Baru di Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Evaluasi pelaksanaan otda di 8 (delapan) kab. yang baru dimekarkan.
7. Program Penyelesaian Batas Wilayah di Propinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran program ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya konflik antar wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang kegiatan-kegiatannya antara lain:

- Penyelesaian Batas Wilayah Propinsi Kalteng dengan Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan bagi Kabupaten/Kota.
8. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren (PONPES) dan Madrasah di Propinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran program ini ditujukan untuk Meningkatkan kualitas Pendidikan pada PONPES dan Madrasah di Propinsi Kalimantan Tengah, yang kegiatan-kegiatannya adalah:

- Fasilitasi Bantuan Untuk Lembaga PONPES dan Mutu Madrasah di Propinsi Kalimantan Tengah.
9. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparat Keamanan dan ketertiban masyarakat

Sasaran program ini adalah menyediakan dasar dan sumberdaya bagi pengembangan SDM aparatur keamanan dan perlindungan masyarakat. Kegiatannya meliputi;

- Fasilitasi Pembangunan Sekolah Polisi Negara di Palangka Raya.
10. Program Perencanaan Bidang Hukum.
- Sasaran program ini ditujukan untuk mengubah/mencabut Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah, yang kegiatan-kegiatannya adalah:

- Evaluasi dan Pengkajian Perda dan Keputusan Hukum Daerah
11. Program Pengembangan Bidang Hukum,
 Sasaran program ini ditujukan untuk penyediaan Buku-buku hukum dan Perundang-undangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, kegiatan-kegiatannya adalah:
- Pengadaan Buku-buku Produk Hukum.
12. Program Pembinaan Hukum,
 Sasaran program ini ditujukan untuk Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengetahui peraturan/ketentuan hukum dan Produk hukum Pemerintah Daerah kegiatan-kegiatannya adalah:
- Sosialisasi Produk Hukum Pemerintah Daerah;
 - Sosialisasi Produk Hukum Pemerintah Daerah;
 - Penyuluhan Hukum Terpadu
13. Program Pemberdayaan lembaga Hukum,
 Sasaran program ini ditujukan untuk partisipasi Lembaga Hukum Adat yang mampu mengakomodir sengketa dan permasalahan hukum di masyarakat. Serta Meningkatnya kualitas kesadaran masyarakat tentang HAM, yang kegiatan-kegiatannya adalah:
- Pemberdayaan Lembaga Hukum Adat;
 - Memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Pemasyarakatan HAM.
14. Program Pendidikan dan Latihan Hukum.
 Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola Jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta meningkatnya kualitas SDM penyusun peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama , yang-kegiatan-kegiatannya adalah:
- Bimbingan Teknis, Konsultasi, Evaluasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
 - Diklat Legal Drafting

- Diklat Legal Officer
15. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan Daerah.
 Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta meningkatkan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif yang kegiatan-kegiatannya antara lain:
- Penyusunan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Apresiasi Organisasi dan Methoda (O & M) bagi pejabat/pegawai yang menangani Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 - Asistensi Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;
 - Diklat Analisis Jabatan;
 - Pengembangan Sistem Data dan Informasi kepegawain yang berbasis komputer,
 - Analisis jabatan (ANJAB)
16. Program Pembudayaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
 Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan cepat, tepat, dan transparan serta meningkatkan keberfungsian dokumen AKIP sebagai dasar pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah, yang kegiatan-kegiatannya adalah:
- Bintek AKIP bagi Eselon III dan IV;
 - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
 - Peningkatan sistem Waskat
17. Program Pengembangan Informasi Komunikasi dan Media Massa.
 Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hasil kegiatan pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan meningkatkan ketrampilan

bidang kehumasan bagi aparaturnya kabupaten/kota, yang kegiatannya adalah:

- Bantuan Penunjang Peliputan Pemberitaan
- Ekspose Hasil Kegiatan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
- Fasilitasi Forum Konsultasi dan Komunikasi Kehumasan; dan
- Pelatihan Ketrampilan Bidang Kehumasan bagi Aparatur Kab/Kota Lama dan Pemekaran

18. Program Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama kegiatan pameran, promosi, festival dan investasi di Propinsi Kalimantan Tengah, yang kegiatannya adalah:

- Memfasilitasi kegiatan pengembangan ekonomi produktif di daerah

19. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Sasaran program ini ditujukan agar terintegrasinya kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang kegiatannya antara lain:

- Sosialisasi/advokasi kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah kepada eksekutif, yudikatif swasta (LSM) perguruan tinggi.

20. Program Peningkatan peran masyarakat dan peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah partisipasi pengarusutamaan gender dan meningkatkan kemampuan *leadership* di lembaga organisasi perempuan, yang kegiatannya adalah:

- Sosialisasi pengarusutamaan gender;
- Pelatihan kepemimpinan bagi kelembagaan perempuan; dan
- Fasilitasi Pembentukan komisi dan forum kesetaraan dan keadilan gender.

- Fasilitasi untuk organisasi perempuan dan hari besar perempuan.

21. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan.

Sasaran program ini ditujukan untuk pembuatan kebijakan program pemberdayaan perempuan dan bahan untuk merevisi Perda yang bias gender, kegiatannya antara lain:

- Studi evaluasi program pembangunan Pemberdayaan Perempuan di daerah; dan
- Kajian terhadap peraturan daerah yang bias gender.

22. Program Pengembangan Kinerja Anggota DPRD.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan wawasan Anggota Dewan terhadap perencanaan dan pemecahan masalah Pembangunan di Daerah, tertampungnya aspirasi masyarakat dan meningkatkan mobilitas dan kelancaran Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yang kegiatannya adalah:

- Melaksanakan Advokasi;
- Pembekalan;
- Mengikuti Pertemuan Regional dan Nasional;
- Study Banding ke Daerah Lain Yang Lebih Maju (waktu Reses);
- Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik;
- Pemeliharaan/Perawatan Fasilitas dan Prasarana Fisik;
- Penjaringan Aspirasi Masyarakat;

23. Program Peningkatan kemampuan dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi serta wewenang pegawai di lingkungan Balitbangda.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas-tugas dalam penelitian yang semakin baik, yang kegiatannya adalah:

- Pelatihan ketrampilan tentang penelitian

24. Program Peningkatan kemampuan dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi serta wewenang pegawai di lingkungan Balitbangda.

Sasaran program ini adalah menyediakan sumberdaya manusia yang trampil dalam melaksanakan berbagai bidang penelitian yang mendukung pengembangan sumberdaya dan potensi daerah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi;

- Pembahasan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil-hasil penelitian sebagai masukan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun kebijakan pembangunan oleh dewan pakar daerah dan lembaga penelitian.
- Fasilitasi terjalannya jaringan kerjasama penelitian untuk mengembangkan produk-produk unggulan daerah.

25. Program Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

Sasaran program ini ditujukan untuk penyediaan ruangan yang memadai untuk keperluan pelayanan aktifitas penelitian dan pengembangan, yang kegiatan-kegiatannya adalah:

- Rehabilitasi ruang aula serbaguna dan perlengkapannya

26. Program Pengembangan Informasi Komunikasi dan Media Massa.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan TI/SI telematika dan media massa, yang kegiatan-kegiatannya adalah:

- Penyusunan kebijakan TI/SI Telematika & Media Massa di Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
- Penyusunan Acuan Kerja TI/SL Telematika dan Media Massa Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
- Menyusun Konsep Jaringan Infokom Antara Propinsi dengan Kab/Kota
- Pengawasan Jaringan Infokom antara Propinsi dengan Kab/Kota

27. Program Pembangunan Teknologi SIMDA.

Sasaran program ini ditujukan untuk Meningkatkan jumlah penggunaan TI/SIMDA dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, yang kegiatan-kegiatannya adalah:

- Pengadaan TI/SIMDA
- Pembangunan Pusat Theater Multi Media Berbasis Berbasis Komputer

28. Program Pengawasan Aparatur Pemerintah.

Sasaran program ini ditujukan untuk mengidentifikasi Pengaduan Masyarakat tentang Pemeriksaan Khusus dan meningkatkan jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut (TL) hasil pemeriksaan, yang kegiatan-kegiatannya adalah

- Pemeriksaan Khusus
- Pemeriksaan Reguler
- Evaluasi Pemeriksaan Fisik dan Keuangan Bangunan
- Pengawasan Tindak lanjut Pemeriksaan
- Gelar Pengawasan Tindak Lanjut Ternuan

29. Program Peningkatan Aparatur Pengawas.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah aparatur yang paham teknis pengawasan dan tugas dan Fungsi Auditor, yang kegiatan-kegiatannya adalah :

- Bimbingan Teknis Pengawasan (BINTEK)
- Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

30. Program Peningkatan Budaya Politik.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan keberfungsian partai politik dalam upaya pembudayaan demokrasi Pancasila dan pembudayaan politik sesuai rambu-rambu peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang kegiatan-kegiatannya adalah :

- Sosialisasi UU Partai Politik pada Partai Politik dan LSM
- Formokon Ormas LSM

31. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Ketentraman dan Keamanan Masyarakat.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesbang Linmas di Propinsi Kalteng dan Kabupaten/Kota, yang kegiatan-kegiatannya adalah :

- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesbang Linmas

31. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Ketentraman dan Keamanan Masyarakat.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesbang Linmas di Propinsi Kalteng dan Kabupaten/Kota, yang kegiatankegiatannya adalah :

- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesbang Linmas

32. Program Perlindungan Masyarakat.

Sasaran program ini ditujukan Untuk meningkatkan keamanan penduduk dampak konflik etnik, yang kegiatankegiatannya adalah :

- Inventarisasi Aset dan Data Penduduk Akibat Dampak Konflik Etnik
- Sosialisasi Kepada Masyarakat Akibat Dampak Konflik Etnik
- Rehabilitasi Penduduk Akibat Dampak Konflik Etnik

33. Program Pembudayaan Filosofi Huma Betang di Masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan tokoh masyarakat dalam sosialisasi Filosofi Huma Betang dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Filosofi Huma Betang, yang kegiatan-kegiatannya adalah:

- Penyusunan prinsip dan asas.filosofi Huma Betang
- Sosialisasi filosofi Huma Betang pada Tokoh Masyarakat Pendatang

34. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan PAD.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan upaya penggalan dan pengembangan sumber-sumber PAD; meningkatkan kesadaran masyarakat Wajib PDRD dan pungutan lainnya; meningkatkan upaya penggalan Pungutan BUMD dan penerimaan lainnya, meningkatkan upaya pencapaian target Dana Perimbangan tepat waktu, yang kegiatan-kegiatannya antara lain:

Penelitian (*Action Rscarch*) tentang basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyusunan kebijakan Penggalan dan Pengembangan Sumber-sumber PAD

- Sosialisasi Kebijakan PDRD dan pungutan daerah lainnya
- Penyusunan Teknis Administrasi Pungutan BUMD dan penerimaan lainnya
- Penyusunan Kebijakan Teknis Realisasi Dana Perimbangan
- Penyusunan kebijaksanaan teknis realisasi dana perimbangan
- Pengawasan intern dan pembinaan bidang keuangan, materiil dan personil pengelola pendapatan daerah

35. Program Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas penilaian potensi PDRD dan pungutan daerah lainnya; dan Meningkatkan kemudahan layanan Samsat kepada masyarakat, yang kegiatan-kegiatannya adalah :

- Penyederhanaan sistem, mekanisme dan administrasi pungutan daerah;
- Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) yang transparan dan bertanggungjawab;
- Pembentukan UPPD/Samsat siap pakai pada 2 Kabupaten Pemekaran;
- Rehab total eks Kantor Dinas Pertambangan untuk kantor UPPD/Samsat Palangka Rava.
- Pengadaan meubelair/peralatan kantor untuk UPPD/Samsat Palangka Rava.
- Rehab Kantor UPPD di Buntok, K. Kapuas dan M. Teweh.
- Pembangunan tempat cek fisik kendaraan di UPPD P. Raya, P. Bun, Buntok dan M. Teweh.

36. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran program ini ditujukan untuk peningkatan penggunaan Dokumen Perencanaan Sumberdaya Aparatur

untuk pelaksanaan kegiatan dan Pedoman serta Standar Alokasi Kebutuhan Aparatur sesuai dengan Bidang Tugas, Keahlian dan Tingkat pendidikan dalam pelaksanaan alokasi Kebutuhan, yang kegiatan-kegiatannya adalah :

- Perencanaan Kebutuhan Sumberdaya Aparatur di Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah
- Penyusunan Pedoman dan Standar Alokasi Kebutuhan Aparatur sesuai dengan Bidang Tugas, Keahlian dan Tingkat pendidikan

37. Program Perencanaan dan Pengembangan Diklat Jabatan Struktural dan Fungsional.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur struktural dan teknis fungsional, yang kegiatan-kegiatannya adalah :

- Penyusunan perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan latihan bagi aparatur daerah serta kemasrakatan.
- Diklat struktural, melalui pendidikan dan pelatihan kader serta pendidikan dan pelatihan pimpinan.
- Pendidikan dan latihan teknis administrasi Umum dan Manajemen bagi pegawai di lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Pendidikan dan latihan substantif depdagri yang meliputi manajemen dan reorientasi pemerintah di masa depan serta tata pemerintahannya bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah propinsi Kalimantan Tengah.
- Pendidikan dan latilian fungsional yang, meliputi diklat fungsional keuangan dan pembangunan.
- Pendidikan dan latihan bagi masyarakat tentang pembangunan sosial kemasrakatan dan pembinaan lembaga swadaya masyarakat.
- Membangun dan merehabilitasi gedung kantor, asrama diklat, ruang kelas, perpustakaan dan pengembangan alat bantu diklat lainnya.

38. Program Peningkatan Pelayanan Perencanaan Pembangunan.

Sasaranprogram ini ditujukan untuk Penyusunan arah kebijaksanaan umum pembangunan daerah, program-program pembangunan daerah jangka menengah, rencana program dan kegiatan yang strategis dan acuan Penyusunan RAPBD dan monitoring dan evaluasi Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, yang kegiatan-kegiatannya adalah:

- Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Dokumen Politis/Perencanaan Pembangunan Induk)
 - Penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) atau Dokumen Perencanaan Manajerial Pembangunan
 - Penyusunan Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) atau Dokumen Taktis-Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) atau Dokumen Pelaksanaan Teknis Operasional Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Pembangunan Regional Kalimantan
 - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
39. Program Pengembangan Jaringan Sarana dan Prasarana Antar Kota.

Sasaran program ini ditujukan untuk meningkatkan pengembangan perencanaan transportasi Kalimantan dan meningkatnya ketersediaan data untuk perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, yang kegiatan-kegiatannya adalah:

- Perencanaan dan Pengembangan Database Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Manajemen Sumberdaya Air serta penjabarannya ke dalam action plan
40. Program Penataan Ruang.

Sasaran program ini ditujukan untuk Meningkatkan penggunaan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Pesisir,

Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan yang sinkron dan serasi dengan Rencana Tata Ruang Prop Kalteng, yang kegiatan-kegiatannya adalah :

- Pemanfaatan dan Pengendalian Pendayagunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan

41. Program Pengembangan Peclesaan

Sasaran program ini ditujukan sebagai Acuan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh untuk Penyusunan program dan kegiatan yang terencana, efektif dan efisien, yang kegiatan-kegiatannya adalah :

- Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

42. Program Peningkatan Ekonomi Wilayah.

Sasaran program ini ditujukan untuk pengalokasian penggunaan sumberdaya ekonomi yang optimal yang kegiatan-kegiatannya adalah:

- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Regional

43. Program Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Energi.

Sasaran program ini ditujukan untuk koneksitas jaringan sistem Ketenagalistrikan Kalimantan, kegiatan-kegiatannya antara lain:

- Penyusunan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD).

4.3. BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

1. Program Pengembangan Agribisnis

Sasaran utama program ini adalah untuk memberikan sentuhan teknologi dan manajemen modern pada sistem pertanian yang dilaksanakan di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan akan memberikan dampak peningkatan produktivitas serta nilai tambah bagi para pelaku bidang pertanian. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pengembangan Standarisasi Mutu dan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Diklat kewirausahaan Agribisnis
 - Penerapan ISO dan *ecolal7effing* untuk meningkatkan daya saing produk pertanian
 - Diklat Fungsional Agribisnis Bagi KTNA dan petani maju
 - Diklat fungsional agribisnis (5 sub sistem) bagi aparatur dinas prop/kab kota
 - Magang bidang perbenihan petugas dan petani penangkar
 - Fasilitasi kemitraan usaha antara petani dan pengusaha
 - Fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian
 - Fasilitasi Penunangan Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian Menengah.
 - Pembinaan dalam pembangunan On Farm perkebunan.
 - Fasilitasi pengembangan unit perbenihan dan bibit tanaman perkebunan.
 - Fasilitasi Pengembangan Unit Pengolahan hasil perkebunan.
 - Fasilitasi pembentukan asosiasi petani CCDC dan koperasi perkebunan.
 - Pengembangan jaringan kerjasama perkebunan
- #### 2. Program Agribisnis Peternakan
- Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk menstimulasi perkembangan usaha peternakan yang dikelola dengan teknik dan manajemen agribisnis, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;
- Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana peternakan.
 - Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil hewan
 - Fasilitasi kemitraan usaha antara peternak dengan pengusaha.
 - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.
 - Fasilitasi Penangkaran dan Pengembangan Ternak unggulan daerah.

4.4. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

1. Program Pengembangan Kelautan

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat perikanan Kalimantan Tengah dalam mengelola Sumberdaya kelautan secara efektif dengan tidak meninggalkan prinsip kelestarian bagi keberlanjutan produksi di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam lingkup program ini, meliputi;

- Pengembangan Kawasan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Peningkatan Pembinaan Perizinan Usaha Penangkapan Ikan
- Pengawasan Pen elolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

2. Program Agribisnis

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memperkuat basis kuantitas dan kualitas produksi perikanan di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini, adalah;

- Pelatihan Perbenihan Perikanan
- Operasional Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
- Operasional PPI
- Survey Potensi Desa Perikanan

4.5. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. Program Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Energi

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk menyediakan basis informasi yang relevan bagi penemuan sumberdaya pertambangan dan mineral baru yang pada akhirnya akan memberikan cadangan bagi peningkatan volume produksi pertambangan Propinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam lingkup program ini adalah;

- Survey pemanfaatan potensi sumber daya mineral
 - Pengujian pembuatan briket gambut yang 3 E
 - Survey potensi wilayah pertambangan rakyat (WPR)
- ##### 2. Program Pengembangan Dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
- Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen pertambangan yang ramah lingkungan pada pelaku pertambangan di Propinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;
- Pembinaan usaha ketenagalistrikan dan migas
 - Bimbingan Teknis usaha pertambangan
- ##### 3. Program Pengendalian Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Tengah

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk mengendalikan kerusakan Sumberdaya alam yang disebabkan oleh penambangan liar serta tidak mengindahkan prosedur pertambangan. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (PETI).

4.6. BIDANG KEHUTANAN

1. Program Perlindungan Hutan Dan Konservasi Hutan

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk melindungi kelestarian sumberdaya hutan dari kerusakan yang lebih parah. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pencegahan dan pemberantasan illegal logging
 - Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
 - Pengendalian peredaran hasil hutan.
- ##### 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memfasilitasi pengembalian fungsi hutan sebagai penyangga

kelestarian sumberdaya alam. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup kegiatan ini, adalah;

- Koordinasi kegiatan bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Penyusunan Pecloman Pembinaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Reboisasi dan Penghijauan.

3. Pengembangan Sistem Usaha Kehutanan Skala Kecil, Menengah, dan Koperasi Bagi Masyarakat Lokal.

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memfasilitasi penggunaan sumberdaya hutan bagi kesejahteraan masyarakat disamping meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian Sumberdaya hutan. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Fasilitasi penyelenggaraan Kemitraan dalam pengelolaan hutan
- Koordinasi Kebijakan dan Kegiatan Usaha Hutan Kemasyarakatan

4. Pengembangan Perencanaan dan Kelembagaan Kehutanan

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memfasilitasi penyediaan informasi pelebagaan sumberdaya daerah dalam Perlindungan Sumberdaya hutan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan
- Penyusunan Perda Kehutanan Daerah

4.7. BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

1. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Indag

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memperkuat substansi dan kualitas kebijakan di bidang industri dan perdagangan. Pada akhirnya semua diharapkan kebijakan yang diluncurkan mampu memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dunia usaha di Kalimantan Tengah. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Penyusunan panduan pembukaan dan pengembangan usaha skala rumah tangga dan kecil
- Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Industri dan perdagangan

2. Tera & Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memberikan kepastian dan Standar Perlindungan ukuran bagi masyarakat, kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini, adalah;

- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan.

3. Program Peningkatan Iptek Dunia Usaha

Keberadaan program ini diarahkan pada penyebarluasan informasi dan promosi produk industri dan perdagangan Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan akan memberi efek pada peningkatan daya saing komoditas industri Propinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah;

- Promosi dagang dan industri
- Pemantauan produk ekspor daerah.

4. Program Perlindungan Konsumen

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk menyediakan basis informasi kepada masyarakat tentang kelayakan konsumsi terhadap barang dan jasa yang beredar bebas di pasaran Propinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah;

- Pengawasan barang dan jasa yg beredar di pasar
- Sosialisasi dan pemasyarakatan UU No. 9 Th. 1999 ttg Perlindungan Konsumen dan UU No.5 Th.1999 Ttg larangan penddk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

4.8. BIDANG KOPERASI DAN UKM

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar pada komoditas yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pengusaha kecil dan menengah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pengembangan Koordinasi Pemberdayaan KUKM
- Penguatan Jaringan Informasi dan akses pasar produk KUKM
- Penumbuhan & Pengembangan Kemitraan bagi KUKM

2. Peningkatan Akses Kepada Sumber Daya Produktif

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memfasilitasi pengembangan sentra usaha yang menstimulasi perkembangan usaha kecil dan menengah di Propinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah;

- Penumbuhan & Pengembangan BDS

3. Program Pengembangan Kewirausahaan KUKNI

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memperkuat penguasaan teknologi dan manajemen pada sumberdaya manusia usaha kecil dan menengah di Propinsi Kalimantan Tengah, disamping memperkuat pembelajaran pengalaman (*lesson learned*) diantara para usahawan kecil dan menengah. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi;

- Penumbuhan & Pengembangan Kemitraan bagi KUKM

4.9. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Kompetitif dan Non Diskriminatif

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk

memfasilitasi peningkatan iklim yang kondusif bagi peningkatan aliran investasi modal di Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pengembangan dan koordinasi kebijakan penanaman modal daerah
- Penyusunan dan Pembuatan Peta investasi Propinsi Kalimantan Tengah

2. Program Peningkatan Kualitas SDM di BPMD

Sasaran utama keberadaan program ini adalah memfasilitasi perluasan pengetahuan Penyusunan kebijakan di bidang penanaman modal bagi aparat BPMD se Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhir program ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kebijakan penanaman modal yang kondusif di seluruh kabupaten/kota Propinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pelatihan TOT Penanaman Modal se Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Penanaman Modal Bagi aparat Pemerintah Daerah se Kalimantan Tengah di Palangka Raya

3. Program Peningkatan Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Sasaran utama keberadaan program ini adalah memfasilitasi promosi komoditas-komoditas perdagangan Kalimantan Tengah baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan ekspor komoditas dagang Propinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah;

- Mengikuti pameran produk ekspor di Jakarta
- Mengikuti pameran produk ekspor Daerah (PPED) DI Yogyakarta

- Mengikuti pameran Jakarta fair (PRJ) di Jakarta
 - Mengikuti pameran Agro dan FOOD EXPO
 - Pembuatan VCD Potensi Produk unggulan daerah di 14 Kab/ kota se Kalimantan Tengah.
4. Program Perijinan, Pengawasan Dan Pengendalian Penanaman Modal

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memperkuat dampak positif dari aliran investasi modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Penyuluhan perijinan/ fasilitasi penanaman modal bagi perusahaan PMA/ PMDN di 14 Kab/ Kota se Kalteng.
- Pengawasan dan Pengendalian terhadap perusahaan PMA/ PMDN yang bersifat lintas Kab/ Kota

4.10. BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Program Perlindungan Dan Pengembangan Kelembagaan

Sasaran utama program ini adalah untuk memfasilitasi Perlindungan dan jaminan kesejahteraan terhadap tenaga kerja industri di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pengkajian dan Pengembangan Sistim Pengupahan dan Jamsostek
- Bintek Sistim Manajemen K3 Bagi Perusahaan
- Pengawasan UMP dan jamsostek
- Sosialisasi dan Dialog HI dengan Anggota SPSI, Apindo dan LSM
- Pengkajian dan Pengembangan Sistem Pengupahan dan Jamsostek

2. Program Penciptaan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk mengembangkan basis informasi dan kebijakan yang tepat dalam mempertemukan sisi permintaan dan penawaran tenaga

kerja di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)
- Pemantauan Kesempatan Kerja Sektoral
- Sosialisasi dan Dialog HI dengan Anggota SPSI, Apindo dan LSM

3. Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memfasilitasi pengembangan pusat latihan kerja yang profesional serta mampu memenuhi kebutuhan keahlian dunia usaha di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pembangunan Pusat Latihan Kerja di Kalteng

4. Program Peningkatan Kualitas Dan Keterampilan Tenaga Kerja

Sasaran utama program ini adalah untuk memfasilitasi sinkronisasi permintaan dan penawaran keahlian di pasar tenaga kerja Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian dan upah yang layak. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral dan Regional
- Koordinasi Perencanaan Pelatihan

4.11. BIDANG KESEHATAN

1. Program Peningkatan Perilaku Sehat.

Sasaran utama keberadaan program ini adalah menyediakan media dan sosialisasi informasi yang relevan bagi masyarakat dalam kerangka menerapkan budaya dan perilaku hidup sehat. Pada akhirnya, program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pengembangan Media KIE Prilaku Sehat
 - Penyuluhan Bahaya Merokok dan Madat
2. Program Pencegahan Kecelakaan dan Rudapaksa
- Sasaran utama keberadaan program ini adalah menyediakan basis informasi yang relevan bagi masyarakat dalam menangani serta pencegahan dini terhadap kecelakaan dan rudapaksa. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;
- Pengkajian dan Pencegahan Faktor-faktor resiko serta penanganan yang menimbulkan kecelakaan dan rudapaksa.
3. Program Pencegahan Penvakit Tidak Menular
- Sasaran utama keberadaan program ini adalah menyediakan basis informasi yang relevan bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya wabah penyakit tidak menular. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;
- Penyebarluasan informasi faktor-faktor resiko penvakit tidak menular.
4. Program Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat
- Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi peningkatan kualitas kesehatan jiwa masyarakat. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;
- Pengembangan dan pemantapan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.
 - Diklat tenaga kesehatan bidang pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
 - Penyebaran informasi tentang kesehatan jiwa.
5. Program Penyehatan Lingkungan
- Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti

penting higienitas dan sanitasi. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan lingkungan yang sehat perkampungan penduduk di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Penyuluhan dan kampanye hygiene dan sanitasi.
6. Program Pemberantasan Penyakit Menular
- Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk menyediakan pranata sistem yang diperlukan bagi pencegahan, pengobatan dan penanggulangan wabah penvakit menular. Pada akhirnya, program ini diharapkan mampu menangkal akibat lebih buruk dari penvebaran penyakit wabah penyakit menular. Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini, meliputi:
- Penemuan dan pengobatan penderita baik secara aktif maupun pasif dan penatalaksanaan kasus di pelayanan kesehatan.
 - Pelaksanaan Sistem kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan fokus serta KLB.
7. Program Penyembuhan Penyakit Dan Pemulihan Kesehatan (YANKES DSR).
- Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk menyediakan basis kompetensi pada Sumberdaya manusia kesehatan di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;
- Pelatihan petugas kesehatan tentang jaminan niutu dan pengobatan yang rasional.
 - Meningkatkan jangkauan pelayanan kepada kelompok masyarakat rawan kesehatan (masyarakat kumuh, terasing, miskin).
 - Pelatihan tenaga atau petugas kesehatan mengenai program pelayanan kesehatan dasar.

8. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memberikan jaminan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk golongan masyarakat tidak mampu. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pengembangan dan pematapan program jaminan mutu dan pengobatan rasional di RS melalui pelatihan petugas kesehatan tentang jaminan mutu dan pengobatan yang rasional.
- Peningkatkan jangkauan pelayanan kepada penduduk miskin melalui pemberian subsidi.
- Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

9. Pengawasan Obat Makanan dan Bahan Berbahaya

Sasaran utama bagi keberadaan program ini adalah untuk memberi jaminan kelayakan kualitas bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat-obatan. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini meliputi;

- Peningkatan Pengamanan bahaya penyalahgunaan dan kesalahan penggunaan Obat, Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Bahan Berbahaya Lainnya
- Meningkatkan Pengamanan dan pengawasan makanan dan Bahan Tambahan Makanan (BTM)
- Mengembangkan Sistem layanan informasi tentang Obat dan Makanan

10. Program Pelayanan Kesehatan Penunjang Bagi Masyarakat

Sasaran utama program ini adalah untuk memfasilitasi serta memberikan bantuan bagi penanganan penyakit yang mewabah di masyarakat. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pengadaan bahan operasional laboratorium

4.12. BIDANG PENDIDIKAN

1. Program Pembinaan Pendidikan Dasar

Sasaran utama program ini adalah menyediakan basis informasi yang relevan tentang status penyelenggaraan pendidikan dasar di Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dasar serta jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pelatihan dan penataran bagi pengelola pendidikan dasar di propinsi, kabupaten/kota
- Penyusunan profil pendidikan dasar propinsi, kabupaten/kota
- Pengembangan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
- Peningkatan Pendidikan Luar Biasa (SDLB dan SLB)

2. Program Pembinaan Pendidikan Menengah

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memberikan dukungan bagi ketersediaan kwikulum yang berbasis lokal disamping mentranfer kurikulum tersebut kepada para penyelenggara pendidikan menengah di Propinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Penyusunan kurikulum yang berbasis pada kompetensi pendidikan menengah
- Sosialisasi kurikulum Pendidikan menengah

3. Program Dukungan Pengembangan Pendidikan Tinggi

Sasaran utama program ini adalah menyediakan dukungan bantuan bagi penyelenggaraan pendidikan kepada universitas dan lembaga perguruan tinggi yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kegiatan-kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Fasilitasi bantuan dukungan bagi pengembangan pendidikan tinggi

4. Program Pendidikan Luar Sekolah

Sasaran utama keberadaan program ini adalah memberikan bantuan teknis dan finansial bagi pemberantasan buta huruf dan keterbelakangan pendidikan di Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan terhadap tingkat pendidikan masyarakat Kalimantan Tengah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Kejat Paket A dan B

5. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah

Sasaran utama bagi keberadaan program ini adalah menyediakan basis informasi dan pengetahuan masyarakat melalui operasionalisasi perangkat perpustakaan daerah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pengadaan Buku dan Barang Cetak
- Pelatihan Tenaga Kepustakaan
- Pusling
- Peningkatan Kinerja Tenaga Kearsipan

6. Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Sasaran utama bagi keberadaan program ini adalah untuk menyediakan basis informasi yang relevan tentang nilai-nilai budaya masyarakat Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pelestarian nilai-nilai budaya tersebut dalam dinamika pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Meningkatkan pelestarian, pembangunan dan pemanfaatan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman
- Penulisan Profil Budaya Kalimantan Tengah

7. Fasilitasi Pendidikan Moral, Etika dan Budi Pekerti bagi Pendidikan Menengah dan Atas

Sasaran utama bagi keberadaan program ini adalah untuk meningkatnya kualitas Pendidikan Moral, Etika dan Budi Pekerti bagi Pendidikan Menengah dan Atas di Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendidikan Moral, Etika dan Budi Pekerti bagi Pendidikan Menengah dan Atas. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Koordinasi Pendidikan Moral, Etika dan Budi Pekerti dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tengah
- Penyusunan Kurikulum dan Modul Penataran Pendidikan Moral, Etika dan Budi Pekerti
- Penataran Pendidikan Moral, Etika dan Budi Pekerti bagi Guru di Propinsi Kalimantan Tengah
- Pengadaan Buku Pendidikan Moral, Etika dan Budi Pekerti
- Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Moral, Etika dan Budi Pekerti

4.13. BIDANG SOSIAL

1. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memfasilitasi serangkaian bantuan kepada masyarakat yang mengalami keterbelakangan serta keterpurukan sosial, disamping memperkuat basis sumberdaya penanganan masalah sosial. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan status kesejahteraan masyarakat. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Fasilitasi Penyantunan Anak Terlantar
- Fasilitasi Penyantunan Lanjut Usia
- Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

- Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
 - Fasilitasi Penyantunan Penyandang Cacat
 - Penyantunan Anak Nakal dan Korban Narkotika
 - Penyantunan Tuna Sosial
 - Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin
 - Penanggulangan Bencana Alam
 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan dan Kejuangan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (CERD, PPK, P2D, DPD dan KPK)

Sasaran utama keberadaan program ini adalah menyediakan bantuan penunjang bagi kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari sumberdana APBD. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap kesuksesan program pemberdayaan masyarakat yang berujung pada terentaskannya sejumlah masyarakat dari kemiskinan. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Fasilitasi Penunjang Pemberdayaan Masyarakat
3. Program Bidang Keswadayaan
- Sasaran utama keberadaan program ini adalah menstimulasi peningkatan partisipasi warga dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;
- Perlombaan desa/Kelurahan se Kalimantan Tengah
 - Kemitraan dengan TNI dalam rangka TNI Manunggal membangun desa
 - Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), P2WKSS dan PKK
 - Pemasarakatan dan Pagelaran Teknologi Tepat Guna.

4.14. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi
- Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk mengembangkan serta memelihara sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan antar pusat aktivitas ekonomi di Propinsi Kalimantan tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan arus barang dan jasa yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini, meliputi:
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
 - Peningkatan/pembangunan transportasi jalan
 - Peningkatan/pembangunan jembatan
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan

Sasaran utama program ini adalah mengembangkan serta memelihara infrastruktur pengairan irigasi lintas Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Keberadaan program ini selanjutnya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian yang berujung pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini, meliputi;

- Pembangunan irigasi Kalteng
- Pembinaan dan pengendalian pengairan
- Perbaikan Standar Pengelolaan Sumberdaya Air Permukaan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Kalteng
- Rehabilitasi jaringan irigasi

4.15. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Program Peningkatan Kualitas SDM Bidang Perhubungan
- Sasaran utama program ini adalah menyediakan basis pengetahuan dan teknologi yang relevan bagi sumberdaya

manusia perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah. Keberadaan program ini selanjutnya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas pelayanan perhubungan kepada masyarakat. Secara keseluruhan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Diklat Teknis Fungsional Transportasi Jalan meliputi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Penvidik Pegawai Negeri Sipil
 - Diklat Teknis Fungsional Sungai Danau dan Penyeberangan meliputi Kesyahbandaran, Marine Inspector, Pengukuran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut meliputi Kesyahbandaran, Marine Inspector, Port State Control, Pengukuran, Pendaftaran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - Diklat Teknis Fungsional Pos dan Telekomunikasi meliputi Operator Radio, Teknisi Radio, Manajemen Postel, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Program Peningkatan Disiplin Pengguna Jasa, Pengelola Jasa Perhubungan

Sasaran utama program ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan kedisiplinan pada pengguna dan pengelola jasa transportasi di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap tercipta kenyamanan berlalu lintas. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Sosialisasi / Penyuluhan Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan penggunaan jasa transportasi Jalan, Sungai, Laut, Udara dan Penggunaan Jasa Pos dan Telekomunikasi
3. Program Peningkatan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kalimantan Tengah

Sasaran utama program ini adalah untuk menyediakan fasilitas rambu-rambu jalan yang mendukung kenyamanan

berlalu lintas di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap penurunan tingkat kecelakaan di jalan raya. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Penambahan Rambu lalu lintas, Guadrail/pagar pengaman, delinator, pengecatan ulang marka jalan, perbaikan traffic light dan sarana pendukung operasional
 - Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas,Guadrail/pagar pengaman, delinator, pengecatan marka jalan, traffic light Pembangunan jembatan timbang
4. Program Peningkatan Pelayanan Penerbangan Kalimantan Tengah

Sasaran utama program ini adalah untuk memberikan dukungan rehabilitasi beberapa fasilitas yang ada di Bandar Tjilik Riwut Palangkaraya. Pada akhirnya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap kelancaran lalu lintas udara dari dan ke Palangkaraya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas Transportasi Udara Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya

4.16. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengembangan Dan Peningkatan Akses Informasi SDALH

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk menyediakan basis informasi yang relevan bagi pengambilan kebijakan bidang lingkungan hidup di Propinsi Kalimantan tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya penataan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Inventarisasi potensi SDA dan LH untuk menyusun Neraca Kualitas SDA Daerah dan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup.

- Pembuatan Booklet, Leaflet Lingkungan Hidup
 - Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Daerah
2. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Sasaran utama program ini adalah untuk memperkuat upaya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam yang telah dilaksanakan selama ini. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kelestarian sumber daya hutan Propinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini meliputi;

- Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Manfaat Pengelolaan Kawasan Konservasi Dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.
- Pengendalian Dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi Dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

3. Program Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memberikan jaminan kualitas bagi upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Propinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini meliputi;

- Melakukan Penelitian dan Penyusunan Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Limbah.
- Sosialisasi Perda Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Limbah Serta Penyuluhan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- Pengadaan/Penyediaan peralatan serta fasilitas/perengkapan Laboratorium Lingkungan

4. Program Penataan dan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memperkuat basis hukum upaya pelestarian sumberdaya

kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan pelestarian sumberdaya kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini meliputi;

- Pengembangan Perangkat Hukum dan Peraturan Perundang Undangan (Perda) Lingkungan Hidup Daerah
- Sosialisasi Perundang-Undangan (Perda) Lingkungan Hidup Daerah
- Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Amdal, UKL dan UPL.

5. Program Pengembangan dan Pengefolaan Suniber-Sumber Air

Sasaran utama program ini adalah untuk menifasilitasi pelaksanaan pengelolaan pelestarian sumber daya sungai antar Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tengah. Keberadaan program ini selanjutnya digarapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan transportasi sungai yang berujung pada peningkatan aktivitas perekonomian. Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Prokasih Lintas Kab/Kota

6. Program Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Lingkungan Hidup.

Sasaran utama program ini adalah nienvedikan kompetensi bagi sumber daya manusia di bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Propinsi Kalimantan Tengah, Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Penyelenggaraan kursus Amdal A, B dan C
- Penyelenggaraan Kursus/Pelatihan Audit Lingkungan dan Manajemen Lingkungan

417. BIDANG KEPENDUDUKAN

1. Program Masyarakat Transmigran dan Masyarakat sekitar

Sasaran utama program ini adalah untuk menfasilitasi upaya percepatan pemberdayaan masyarakat di lokasi-lokasi transmigrasi di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di lokasi-lokasi transmigrasi. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pelatihan dan ketrampilan pemberdayaan masyarakat bagi pemuka masyarakat transmigrasi

2. Program Pengembangan Transmigrasi di Kabupaten Pemekaran

Sasaran utama keberadaan program ini adalah untuk memfasilitasi dan menstimulasi pengembangan wilayah transmigrasi di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah:

- Fasilitasi Penyusunan RTSP di 8 Kabupaten

3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Sasaran utama program ini adalah memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan reproduksi pada remaja. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah:

- Peningkatan Promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- Peningkatan Advokasi KRR
- Peningkatan Kegiatan Konseling
- Peningkatan Dukungan Pelayanan Bagi Remaja
- Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi

4.18 BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Program Pengembangan Kebijakan Olahraga Daerah dan Kepemudaan

Sasaran utama program ini adalah untuk mengembangkan kebijakan olahraga dan Kepemudaan yang relevan serta sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan prestasi olahraga daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Penyusunan Pedoman tentang Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga

2. Program Pemasarakatan Olahraga Dan Kesejahteraan

Sasaran utama program ini adalah untuk menstimulasi peningkatan motivasi dan prestasi olahraga di Propinsi Kalimantan Tengah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan prestasi olahraga masyarakat Kalimantan Tengah. Sedangkan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah;

- Penyelenggaraan Kejuaraan-kejuaraan Olahraga di daerah

3. Program Peningkatan Partisipasi Pemuda

Sasaran utama program ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan terutama dalam menangani permasalahan-permasalahan kekinian di daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Pelatihan model TOT bagi Kader Pemuda tentang Pemberantasan Narkoba / HIV/ AIDS
- Fasilitasi Penunangan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

4.19. BIDANG PARIWISATA

1. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sasaran utama program ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan sumberdaya manusia Kalimantan Tengah di bidang pariwisata. Keberadaan program ini selanjutnya diharapkan memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah. Secara

keseluruhan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Peningkatan Usaha jasa Pariwisata
- Penyuluhan sadar wisata

2. Program Peningkatan Ketahanan Budaya

Sasaran utama program ini adalah untuk memfasilitasi bentuk kreasi segmen masyarakat seni dan budaya Propinsi Kalimantan tengah yang mengarah pada peningkatan pariwisata daerah. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan pariwisata Propinsi Kalimantan tengah. Sedangkan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup program ini adalah;

- Dialog Budaya
- Peningkatan pemanfaatan seni dan budaya

BAB 5

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

Secara konseptual, pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan salah satu sub-siklus penting dari implementasi siklus manajemen strategis. Prasyarat bagi pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja selanjutnya harus didukung oleh keberadaan sub siklus lainnya. Secara keseluruhan siklus manajemen strategis terdiri dari;

a. Sub siklus perencanaan strategis,

Pada tahap ini program dan kegiatan ditetapkan dengan mengacu pada kelayakan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi daerah.

b. Sub-siklus penganggaran,

Pada tahap ini program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahap perencanaan strategis ditentukan pembiayaannya dengan mengacu pada kelayakan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas

c. Sub-siklus Implementasi,

Pada tahap ini, program dan kegiatan yang telah ditentukan pembiayaannya dilaksanakan, dimonitor serta didokumentasikan ke dalam bentuk pencatatan yang sistematis sehingga dapat memenuhi kebutuhan data dan fakta untuk evaluasi dan pelaporan.

d. Sub-siklus pengukuran dan evaluasi kinerja,

Pada tahap ini, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diukur dan dievaluasi serta dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada *stakeholder*. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja selayaknya memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian visi dan misi serta memenuhi kewajaran prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pada akhirnya keberhasilan dan kegagalan yang ditunjukkan oleh hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik (*feedback*) serta bahan pembelajaran bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

5.2. KERANGKA KERJA KONTEKS PERATURAN DAN PERUNDANGAN

Secara legal formal pengaplikasian kerangka kerja konseptual selayaknya juga didasari oleh koridor kewenangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berkaitan dengan hal tersebut, dua peraturan perundangan yang terkait langsung dengan penerapan kerangka kerja konseptual yang telah disebutkan diatas, adalah;

1. Peraturan Pemerintah No 108 Tahun 2000 Tentang Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Beberapa poin penting yang disebutkan dalam PP 108 ini adalah;

- Pasal 4 poin 2 menyebutkan bahwa setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu I (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- Pasal 5 menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.
- Penjelasan Pasal 5 menyebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah terdiri atas:
 - a. Laporan perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas;
 - d. Neraca Daerah.
- Pasal 17 menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan

pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.

2. Peraturan Pemerintah No 105 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Beberapa poin penting yang disebutkan dalam PP 105 ini terkait dengan pelaksanaan PP 108 adalah;

- Pasal 38 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas
 - a. Laporan perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas;
 - d. Neraca Daerah.
- Pasal 36 poin I menyebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- Penjelasan pasal 38 poin b menyebutkan bahwa Nota Perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja Keuangan Daerah mencakup antara lain:
 - a. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan; kinerja pelayanan yang dicapai;
 - b. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/ pembangunan untuk aparatur Daerah dan pelayanan publik.
 - c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD.
 - d. Posisi Dana Cadangan.
- Penjelasan pasal 38 poin d menyebutkan bahwa Penyusunan neraca Daerah dilakukan sesuai dengan Standar akuntansi keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

5.3. KERANGKA KERJA TEKNIS PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS

Pengukuran dan evaluasi kinerja program dan kegiatan strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Propinsi Kalimantan Tengah ini selayaknya mengikuti kedua konsepsi yang telah disebutkan diatas, disatu sisi memenuhi kelayakan untuk dilaksanakan disisi lain tidak terlepas dari konteks peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh daerah agar memenuhi, i keduanya, adalah;

- Memasukkan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini kedalam sistem anggaran daerah. Kelayakan pembiayaan program dan kegiatan selanjutnya dicermati dengan kacamata prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
- Memonitor dan mendokumentasikan pelaksanaan program dan kegiatan strategis kedalam sistem pencatatan yang sistematis baik dari sisi kinerja yang dihasilkan maupun dari sisi realisasi anggaran.
- Pada akhir tahun anggaran, hasil monitoring dan pencatatan yang dilakukan pada tahap implementasi dikompilasi kedalam Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Kepala Daerah.
- Pada akhir masa jabatan Kepala Daerah, seluruh program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini dinilai kinerjanya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan disamping kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam kerangka pengukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja dan capain kinerja yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan Program. Tahap pengukuran kinerja berikutnya adalah tahap evaluasi kinerja. Tahap ini dimulai dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kebijakan didasarkan pada nilai capaian kinerja kegiatan tersebut.

5.4. EVALUASI KINERJA

5.4.1 Evaluasi kinerja Kegiatan

Nilai Capaian Kegiatan diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai capaian indikator kinerja.

$$\text{Nilai Capaian Kegiatan} = \frac{\text{Nilai Capaian Kegiatan} \times \text{Bobot Indikator Kinerja}}{100\%}$$

5.4.2 Evaluasi kinerja Program

Untuk menghitung nilai capaian kinerja program diperoleh dari penjumlahan seluruh Nilai Capaian Akhir Kegiatan.

$$\text{Nilai Capaian Program} = \frac{S (\text{Capaian Kineda Kegiatan} \times \text{Bobot Kegiatan} / n)}{100\%}$$

5.4.3 Evaluasi Kinerja Kebijakan

Nilai Capaian Kinerja Kebijakan diperoleh dari penjumlahan seluruh Nilai Capaian Program.

$$\text{Nilai Capaian Kebijakan} = \frac{S (\text{Capaian Kineda Kegiatan} \times \text{Bobot Kegiatan} / n)}{100\%}$$

5.4.4 Kesimpulan dan Evaluasi

Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi, dipergunakan skala pengukuran kinerja. Adapun skala pengukuran kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Skala Nilai	Kesimpulan Evaluasi
85 - 100	Sangat Berhasil
70 - 84,99	Berhasil
55 - 69,99	Cukup Berhasil
< 54,99	Tidak Berhasil

5.5. CARA/TEKNIK PENGUKURAN EVALUASI KINERJA

Dalam pengukuran evaluasi kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan dalam evaluasi kinerja Rencana Strategis Pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan 2 cara/teknik pengukuran evaluasi kinerja, yaitu Cara/Teknik Pengukuran Evaluasi Kinerja Tahunan dan Cara/Teknik Pengukuran Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah.

5.5.1. Cara/Teknik Pengukuran Evaluasi Kinerja Tahunan

Dalam Pengukuran Evaluasi Kinerja Tahunan menggunakan indikator kinerja input, proses dan output kegiatan. Pembobotan kegiatan didasarkan pada indikator kinerja dengan metode rata-rata dari input, proses dan output. Formulasi pengukuran kinerja kegiatan adalah:

$$\text{Nilai Capaian Kegiatan} = \frac{(\text{Realisasi Kuantitas} / \text{Rencana Kuantitas} \times \text{Bobot}) + (\text{Rencana Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan} / \text{Realisasi Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan} \times \text{Bobot}) + \text{Rencana Biaya Rata-Rata} / \text{Realisasi Biaya Rata-Rata} \times \text{Bobot}}{3}$$

Pengukuran kinerja program merupakan penjumlahan dari nilai capaian kegiatan 1 sampai dengan n. Pembobotan kinerja program didasarkan pada jumlah anggaran program. Formulasi Pengukuran kinerja program adalah:

$$\text{Nilai Capaian Program} = \frac{\sum (\text{Capaian Kinerja Kegiatan } i \times \text{Bobot Kegiatan } i) / n + \dots}{100\%}$$

Pengukuran kinerja kebijakan merupakan penjumlahan dari nilai capaian program 1 sampai dengan n. Pembobotan kinerja kebijakan didasarkan pada jumlah anggaran kebijakan. Formulasi Pengukuran kinerja kebijakan

adalah : Formulasi Pengukuran Kinerja Kebijakan adalah:

$$\text{Nilai Capaian Kebijakan} = \frac{\sum (\text{Capaian Kinerja Program } i \times \text{Bobot Program } i) / n + \dots}{100\%}$$

5.5.2 Cara/reknik Pengukuran Kinerja Akhir Masa jabatdn Kepala Daerah

Dalam Pengukuran Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah menggunakan indikator kinerja input, output, hasil, manfaat dan dampak kegiatan. Pembobotan kegiatan didasarkan pada indikator kinerja dengan kisaran bobot indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kisaran Bobot
Masukan/Input	30-35
Keluaran/Output	30- 35
Hasil/Outcome	15-20
Manfaat/Benefit	10-15
Dampak/Impact	5-10
Jumlah Bobot	100

Dari konteks pembobotan di atas, nilai capaian suatu kegiatan dapat direalisasikan indikator masukan dan keluaran saja, sedangkan indikator hasil, manfaat dan dampak untuk merealisirnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan. Apabila nilai capaian indikator hasil, nianfaat dan dampak tidak dapat diperoleh, nilai capaian kegiatan maksimal sebesar 60 - 70. Rumus pengukuran kinerja indikator capaian kegiatan, sebagai berikut:

Pengukuran capaian kinerja dengan asumsi bahwa semakin tinggi realisasi, maka semakin tinggi pencapaian indikator kinerja, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinela} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian indikator kinerja dengan asumsi bahwa semakin tinggi realisasi, maka semakin rendah pencapaian kinerja, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Capaian Program} = \frac{[(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Nilai Capaian Program} = \frac{[(2 \times \text{Rencana}) - (\text{Realisasi})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus ini umumnya untuk mengukur capaian kinerja indikator input/masukan pada suatu kegiatan. Nilai capaian indikator kinerja kegiatan digunakan rumusnya:

$$\text{Nilai Capaian Indikator Kerja} = \frac{\text{Capaian Indikator Kinerja} \times \text{Bobot Indikator Kinerja}}{100\%}$$

Nilai capaian kinerja kegiatan digunakan rumusnya:

$$\text{Nilai Capaian Kinerja Kegiatan} = \sum \text{Nilai Capaian Indikator Kinerja Kegiatan}$$